

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi PSAK 109 (PSAK 71) di BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui beberapa tahapan kunci yang melibatkan penyesuaian organisasi dan tata kelola. BPJS Ketenagakerjaan secara berkala memperbarui kebijakan akuntansi, termasuk revisi manual akuntansi dan panduan operasional, melalui konsultasi dengan ahli akuntansi dan auditor. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta melakukan pengawasan internal dan eksternal yang ketat.

Implementasi PSAK 109 (PSAK 71) mencakup klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan serta penurunan nilai instrumen keuangan. BPJS Ketenagakerjaan telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dengan menyampaikan informasi terkait instrumen keuangan yang digunakan secara jelas dan terbuka. BPJS Ketenagakerjaan juga menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mendokumentasikan setiap transaksi keuangan secara teliti dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Dalam hal responsibilitas, BPJS Ketenagakerjaan menerapkan model manajemen risiko berbasis tiga lapis (*Three Lines of Defense*) yang memastikan bahwa seluruh proses manajemen risiko dan kepatuhan berjalan efektif dan terkoordinasi. Prinsip independensi juga dijaga melalui pengawasan yang

dilakukan oleh Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Implementasi PSAK 109 (PSAK 71) oleh BPJS Ketenagakerjaan memiliki dampak baik positif maupun negatif terhadap pengelolaan dana pensiun. Beberapa dampak negatif yang dihadapi antara lain adalah penurunan nilai aset keuangan yang signifikan setelah dikurangi dengan CKPN. Selain itu, kewajiban untuk mencadangkan kerugian kredit ekspektasian (CKPN) menyebabkan peningkatan beban pencadangan. Proses pengukuran dan klasifikasi aset keuangan juga menjadi lebih kompleks dan memerlukan sistem informasi yang lebih canggih serta tenaga ahli yang lebih kompeten untuk memastikan kepatuhan terhadap PSAK 109 (PSAK 71). Kompleksitas ini dapat meningkatkan biaya operasional dan menuntut investasi tambahan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia

Secara keseluruhan, implementasi PSAK 109 (PSAK 71) di BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil diterapkan dengan baik. Proses ini juga menghadapi berbagai tantangan yang telah diatasi dengan solusi yang tepat untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana PSAK 109 (PSAK 71) diterapkan dalam pengelolaan dana pensiun di BPJS Ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan dana pensiun tersebut.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan teori akuntansi keuangan, khususnya dalam konteks lembaga

jaminan sosial. Penelitian ini memperkaya literatur terkait praktik akuntansi, khususnya dalam penerapan PSAK 109 (PSAK 71) di BPJS Ketenagakerjaan. Temuan penelitian ini meningkatkan pemahaman mengenai dampak standar akuntansi terhadap pengelolaan keuangan dan transparansi di lembaga seperti BPJS, serta dampak penerapan PSAK 109 terhadap kepatuhan dan transparansi. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang tantangan dan praktik terbaik dalam menerapkan standar akuntansi baru di lembaga pemerintah dan lembaga keuangan sejenis.

2. Implikasi Praktis

2.1 Bagi BPJS Ketenagakerjaan

Penelitian ini memberikan panduan yang berguna bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan PSAK 109. Dengan mengadopsi temuan dari penelitian ini, BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Panduan ini akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan standar akuntansi yang baru dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pensiun.

2.2 Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik terkait regulasi dan dukungan terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah dapat menggunakan temuan ini untuk

memastikan bahwa regulasi yang diterapkan mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan dana pensiun.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk memberikan konteks yang lebih jelas bagi pembaca mengenai hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Keterbatasan-keterbatasan ini muncul dari berbagai faktor :

Pertama, Penelitian ini menggunakan metode studi kasus terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua lembaga pengelola dana pensiun di Indonesia atau di luar BPJS Ketenagakerjaan. Setiap lembaga memiliki karakteristik dan kebijakan internal yang berbeda, sehingga implementasi PSAK 109 mungkin memberikan dampak yang berbeda.

Kedua, keterbatasan pada sumber data, yaitu pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang terlibat dalam implementasi PSAK 109. Karena keterbatasan dalam jumlah dan posisi responden, informasi yang diperoleh mungkin tidak mencakup semua aspek dari proses implementasi PSAK 109. Kurangnya *diversity* dalam jabatan dan tanggung jawab responden dapat mempengaruhi kelengkapan dan keberagaman data yang dikumpulkan.. Selain itu, penggunaan data sekunder seperti laporan keuangan dan kebijakan internal dapat memiliki keterbatasan dalam hal akses dan kelengkapan data. Beberapa informasi yang relevan mungkin tidak tersedia atau tidak terdokumentasi dengan baik dalam dokumen yang dianalisis.

Ketiga, peneliti mengalami kendala dalam mengakses PSAK 109 secara langsung karena dokumen tersebut hanya tersedia bagi anggota Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI). Keterbatasan akses ini mengharuskan peneliti bergantung pada sumber-sumber sekunder dan interpretasi dari dokumen terkait yang tersedia. Hal ini dapat mempengaruhi kedalaman analisis terhadap implementasi PSAK 109.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperdalam dan memperluas pemahaman mengenai implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana pensiun di BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga serupa.

Pertama, disarankan untuk menggunakan metode penelitian yang lebih beragam. Penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan metode kuantitatif selain kualitatif, seperti survei yang melibatkan lebih banyak responden dari berbagai tingkat jabatan. Hal ini akan memberikan data yang lebih luas dan memungkinkan analisis statistik yang lebih mendalam.

Kedua, penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan penggunaan data primer yang lebih luas dan akses yang lebih baik terhadap dokumen resmi PSAK 109. Upaya untuk mendapatkan keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau bekerja sama dengan anggota IAI untuk mendapatkan akses penuh terhadap dokumen standar akan meningkatkan akurasi dan kedalaman analisis. Dengan demikian, peneliti dapat merujuk langsung pada teks resmi dan mengurangi ketergantungan pada interpretasi pihak ketiga.

Ketiga, disarankan untuk melakukan studi kasus komparatif antara BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga serupa di negara lain yang memiliki standar

akuntansi yang berbeda. Penelitian komparatif ini akan memberikan perspektif internasional dan membantu dalam memahami kelebihan dan kekurangan dari berbagai standar akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana pensiun.

Dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam memahami dan meningkatkan implementasi PSAK 109 di berbagai lembaga pengelola dana pensiun, serta mendukung pengembangan kebijakan akuntansi yang lebih efektif dan efisien.

